BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kerja praktek yang penulis laksanakan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang yang ditempatkan pada Bagian *Pajak Daerah I,* serta didukung oleh teori kepustakaan dan data yang telah penulis pelajari dari pembahaan hasil kerja praktek pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan dan saran yang dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat penulis tarik dari uraian bab-bab sebelumnya mengenai prosedur pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang adalah sebagai berikut.

1. Objek pajak reklame yang diorganisir oleh DPPKAD sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diantaranya :
    a. Reklame Papan/billboard
    b. Reklame Megatron/Videotron

c. Reklame Kain

d. Reklame Melekat (stiker)

e. Reklame Selebaran

f. Reklame Berjalan

g. Reklame Udara

h. Reklame Apung

i. Reklame Suara

j. Reklame Film/Slide

k. Reklame Peragaan

2. Prosedur pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang di mulai dari wajib pajak melakukan pendaftaran, mengajukan izin ke dinas terkait dan mendapatkan surat tembusan, di buatkan SKPD, lalu terakhir membayar sejumlah pajak terutang reklame ke bagian bendaharawan khusus penerimaan DPPKAD. Sistem yang digunakan dalam prosedur pemungutan pajak reklame ini menggunakan *Official Assesment System.* Merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus.

3. Masalah-masalah yang ditemui oleh DPPKAD dalam prosedur pemungutan pajak reklame berasal dari internal (dalam lingkungan DPPKAD) maupun eksternal (luar DPPKAD).

1. Masalah – masalah Internal :
    a. Masih adanya kesalahan penulisan data wajib pajak pada kartu data
    b. Sistem pencatatan data sebagian masih menggunakan mesin ketik, belum semuanya terkomputerisasi
    c. Belum optimal nya perangkat lunak yang menghubungkan secara langsung bagian pajak daerah 1 dengan bagian penerima penyetor.
2. Masalah-masalah Eksternal
    a. Masih banyak nya jenis-jenis reklame yang tidak berizin dan habis masa izin nya namun masih tetap terpasang.

4.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang agar prosedur pemungutan pajak reklame yang dilakukan dapat berjalan dengan lancer. Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan dari hasil kerja praktek adalah sebagai berikut :

1. Dengan banyak nya objek pajak reklame, maka pihak DPPKAD harus lebih ketat dalam pengawasan penyelenggaraan reklame tersebut
2. Agar prosedur pemungutan pajak reklame dapat berjalan dengan baik tentunya di pengaruhi beberapa faktor, kesalahan-kesalahan pada pencatatan data pajak harus diminimalisir sebaik mungkin, sarana dan prasaran penunjang

pemungutan pajak harus lebih ditingkatkan lagi. Karena itu perlu adanya upaya perbaikan pelayanan oleh pihak DPPKAD agar prosedur pemungutan pajak nya bisa berjalan dengan optimal.

3. Penyelenggaraan reklame yang dilakukan oleh wajib pajak harus diawasi dengan baik oleh pihak DPPKAD dengan bekerja sama dinas-dinas terkait seperti Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) dan Satpol PP agar penyelenggaraan reklame tersebut tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan dan saran ini diharapkan dapat berguna untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang prosedur pemungutan pajak reklame, sehingga dapat berguna sebagai pegangan didalam melaksanakan proses pemungutan pajak dalam dinas pemerintah.